

**Tugas Metode Penelitian Administrasi Publik**



**Nama : Theresia Gracia Situmorang**

**NPM : 2256041035**

**kelas : Mandiri B**

**Transformasi Administrasi Publik dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era digital yang sedang berkembang pesat, perubahan drastis terjadi di berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk dalam dunia administrasi publik. Teori administrasi publik telah dikembangkan oleh berbagai ahli dari berbagai perspektif, mencerminkan kompleksitas dan evolusi bidang ini. Dari perspektif klasik, ahli seperti Max Weber menekankan pentingnya birokrasi dalam administrasi publik. Weber menggambarkan birokrasi sebagai sistem yang terorganisir secara hierarkis dengan peraturan yang jelas, tugas yang didefinisikan, dan penugasan berdasarkan kompetensi. Ini adalah pendekatan yang menekankan rasionalitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan (Sujarwoto, 2009).

Dalam perspektif behavioristik, ahli-ahli seperti Herbert Simon memandang administrasi publik dari sudut pandang pengambilan keputusan. Mereka mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan seringkali didasarkan pada keputusan yang tidak sepenuhnya rasional atau berdasarkan logika klasik, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis dan sosial (Hardi, 2020). Sementara itu, perspektif strukturalis, seperti yang diusulkan oleh Frederick W. Taylor, menekankan peran manajemen ilmiah dan perencanaan dalam meningkatkan efisiensi di sektor publik. Teori ini menganggap bahwa administrasi publik dapat ditingkatkan melalui analisis ilmiah dan pengembangan metode kerja yang lebih efisien.

Selain itu, perspektif kontingensi menyoroti pentingnya konteks dan situasi unik dalam administrasi publik. Ahli seperti Joan Woodward menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua situasi, dan solusi administratif harus disesuaikan dengan kondisi khusus. Sementara teori-teori ini memberikan wawasan yang beragam dalam administrasi publik, pemahaman modern sering menggabungkan elemen dari berbagai perspektif ini untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi pemerintahan (Mansyur, 2013). Ini mencerminkan perkembangan dan adaptasi konsep administrasi publik seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah mengelola sumber daya dan memberikan layanan kepada masyarakat. Permasalahannya adalah reformasi birokrasi selama ini belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat (KOLONDAM, 2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah paradigma dasar dalam administrasi publik dengan cara yang sangat signifikan. Pada era sebelumnya, administrasi publik sering kali terkendala oleh proses manual yang rumit dan keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan. Namun, dengan munculnya TIK, pergeseran paradigma ini terjadi secara dramatis.

Konsep transformasi pemerintahan digital adalah suatu strategi yang muncul sebagai upaya pemerintah daerah di Indonesia untuk mengatasi tantangan yang timbul dari kondisi demografi yang unik, yaitu jumlah penduduk yang besar dan luas wilayah yang sangat luas (Sepriano, 2023). Indonesia memiliki populasi yang signifikan dan ragam kebutuhan yang beragam di seluruh pelosok negeri. Dalam konteks ini, pemerintah daerah menghadapi tugas besar dalam memberikan layanan publik yang berkualitas kepada seluruh penduduknya, sambil mempertimbangkan kendala geografis dan sumber daya yang terbatas.

Transformasi digital dalam administrasi publik secara erat terkait dengan konsep Good Governance sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Good Governance menekankan prinsip-prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Transformasi digital membantu mewujudkan prinsip-prinsip ini dengan cara yang lebih efektif (Rahadian, 2019).

1) Melalui transparansi, transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk secara proaktif mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan anggaran, kebijakan, dan tindakan pemerintah. Platform online menyediakan akses terbuka kepada masyarakat untuk memantau dan mengawasi tindakan pemerintah, menciptakan tingkat transparansi yang sesuai dengan prinsip Good Governance. 2) Akuntabilitas pemerintah dapat ditingkatkan dengan transformasi digital melalui pemantauan kinerja yang lebih efektif, pelaporan yang lebih baik, dan pengukuran kuantitatif. Data kinerja dan pelaporan keuangan yang tersedia secara online memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk mengukur pencapaian tujuan dan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan. 3) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat ditingkatkan melalui platform online yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, mengajukan keluhan, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini

menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sesuai dengan semangat Good Governance.

Terakhir, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik dapat ditingkatkan melalui otomatisasi proses administratif, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu. Transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk lebih baik mengalokasikan sumber daya dan menjalankan tugas-tugas mereka, yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dalam Good Governance. Dengan demikian, transformasi digital dalam administrasi publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang merupakan landasan penting dalam menjalankan pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Transformasi pemerintahan digital melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ini mencakup digitalisasi proses administratif, penerapan layanan publik elektronik, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengatasi berbagai tantangan, seperti jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan daerah terpencil, serta meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang tersebar di wilayah yang luas (Setyasih, 2022). Mengintegrasikan pendekatan digital dalam administrasi publik, pemerintah daerah di Indonesia telah memasukkan beberapa aspek penting, termasuk digitalisasi proses administratif, penerapan layanan publik elektronik, dan penggunaan data yang cerdas untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui digitalisasi proses administratif, dokumen-dokumen dan prosedur administrasi tradisional dikonversi ke dalam format digital, yang memungkinkan akses dan pemrosesan yang lebih cepat, serta pengurangan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses manual (Afdila, 2022).

Penerapan layanan publik elektronik mencakup pembuatan platform online di mana warga dapat mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang secara fisik ke kantor pemerintah. Ini sangat bermanfaat dalam mengatasi tantangan jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan daerah terpencil. Masyarakat yang tersebar di wilayah yang luas dapat dengan mudah mengajukan permohonan, melaporkan masalah, atau memperoleh informasi melalui platform ini tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh. Penerapan layanan publik elektronik merupakan langkah penting dalam transformasi pemerintahan digital (Mansyur, 2013). Konsep ini mencakup pembuatan platform online atau portal pemerintah yang

memungkinkan warga untuk mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang secara fisik ke kantor pemerintah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana penerapan layanan publik elektronik memberikan manfaat dan mengatasi tantangan tertentu:

- 1) Aksesibilitas yang Meningkatkan: Salah satu manfaat utama dari layanan publik elektronik adalah peningkatan aksesibilitas layanan pemerintah. Warga, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat pemerintahan, dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah melalui internet. Mereka tidak perlu melakukan perjalanan yang jauh dan seringkali merepotkan untuk mengurus berbagai keperluan administratif.
- 2) Kemudahan Pengajuan Permohonan: Platform layanan publik elektronik memungkinkan warga untuk mengajukan permohonan berbagai jenis, seperti perizinan, pembuatan KTP, izin usaha, atau pendaftaran sekolah, secara online. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin dan mempercepat proses pengolahan permohonan.
- 3) Pelayanan yang 24/7: Layanan publik elektronik biasanya tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Hal ini memberikan fleksibilitas kepada warga untuk mengakses layanan kapan saja sesuai dengan jadwal mereka, tanpa harus memperhatikan jam kerja kantor pemerintah (Rahadian, 2019).

- 4) Efisiensi dan Pengurangan Birokrasi: Dengan memungkinkan warga mengakses layanan secara online, pemerintah dapat mengurangi antrian panjang dan penumpukan berkas di kantor pelayanan. Ini tidak hanya mengurangi birokrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik.
- 5) Transparansi dan Pelaporan: Layanan publik elektronik seringkali dilengkapi dengan fitur pelaporan masalah atau keluhan. Warga dapat dengan mudah melaporkan masalah atau memberikan umpan balik melalui platform ini, yang membantu pemerintah dalam memperbaiki layanan dan meningkatkan transparansi (Prakoso, 2020).
- 6) Penghematan Biaya: Dengan mengurangi kebutuhan untuk mengoperasikan kantor pelayanan konvensional, penerapan layanan publik elektronik dapat menghemat biaya operasional pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang lebih baik.

Secara keseluruhan, penerapan layanan publik elektronik membuka pintu bagi pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses kepada warga, terutama di wilayah yang luas atau terpencil. Ini merupakan langkah progresif dalam meningkatkan pelayanan publik dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Selain itu, penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik menjadi semakin penting. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, pemerintah

daerah dapat memahami lebih baik kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas kebijakan yang lebih efektif. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada data mengurangi risiko kebijakan yang bersifat spekulatif dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Secara keseluruhan, pendekatan ini menghadirkan solusi yang inovatif untuk mengatasi kendala geografis dan logistik yang unik di Indonesia. Dengan menerapkan transformasi pemerintahan digital, pemerintah daerah dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di wilayah yang luas. Ini merupakan langkah yang penting menuju pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif di era digital (Sepriano, 2023).

Dengan menerapkan konsep ini, pemerintah daerah dapat mempercepat proses administratif, mengurangi birokrasi, dan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada warganya. Selain itu, transformasi pemerintahan digital juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena data dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan partisipatif di mana warga dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dengan demikian, konsep transformasi pemerintahan digital menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan responsivitas pemerintah daerah di Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.

Pertama-tama, TIK memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Sistem manajemen data digital memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Ini berarti bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik didukung oleh informasi yang lebih tepat waktu dan terperinci. Contohnya, dalam pengelolaan anggaran, sistem TIK memungkinkan pemerintah untuk melacak pengeluaran secara lebih efektif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, TIK juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih efisien dan mudah diakses. Dengan penerapan layanan pemerintah elektronik (e-government), warga dapat mengakses berbagai layanan publik melalui platform online, seperti mengajukan izin, membayar pajak, atau mengakses informasi kesehatan. Ini mengurangi hambatan birokrasi tradisional dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

TIK dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Dengan informasi pemerintah yang lebih mudah diakses secara online, warga dapat lebih mudah memantau

kegiatan pemerintah dan memberikan masukan mereka. Ini memungkinkan adanya kontrol sosial yang lebih baik dan memperkuat prinsip akuntabilitas dalam administrasi publik. Perkembangan TIK telah mengubah cara pemerintah mengelola sumber daya dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, transparansi, dan partisipasi publik dalam administrasi publik. Transformasi ini telah membawa banyak tantangan dan peluang yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.

Transformasi administrasi publik ini memiliki dampak signifikan pada kualitas layanan publik, akuntabilitas pemerintah, dan efisiensi birokrasi (Supriyadi, 2020). Transformasi administrasi publik dalam era digital memiliki dampak yang dapat diukur dalam tiga aspek kunci. Pertama, dalam hal kualitas layanan publik, penggunaan data kuantitatif, seperti skor kepuasan masyarakat dalam survei, memungkinkan kita untuk melihat perubahan yang terjadi. Dengan transformasi yang efektif, kita dapat mengamati peningkatan signifikan dalam angka-angka tersebut, yang mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Kedua, dalam hal akuntabilitas pemerintah, pengukuran kuantitatif dapat dilakukan dengan melihat data seperti jumlah laporan yang diajukan atau tingkat pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Transformasi administrasi publik yang berhasil harus tercermin dalam peningkatan angka-angka ini, menunjukkan bahwa pemerintah lebih akuntabel dalam mengelola sumber daya dan tugas mereka.

Pengukuran kuantitatif dalam hal akuntabilitas pemerintah adalah suatu pendekatan penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Salah satu metode pengukuran yang dapat digunakan adalah melihat jumlah laporan yang diajukan oleh pemerintah. Laporan-laporan ini dapat mencakup informasi tentang penggunaan anggaran, pencapaian target kinerja, dan hasil audit internal. Semakin banyak laporan yang diajukan, semakin besar tingkat transparansi yang diberikan pemerintah kepada publik mengenai tindakan dan keputusan mereka. Selain itu, tingkat pematuhan pemerintah terhadap undang-undang dan peraturan juga menjadi indikator kunci. Pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas mereka. Dengan memantau dan mengukur tingkat pematuhan ini, kita dapat menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tanggung jawab mereka secara legal dan etis. Transformasi administrasi publik yang berhasil harus tercermin dalam peningkatan angka-angka ini, menunjukkan bahwa pemerintah lebih akuntabel dalam

mengelola sumber daya dan tugas mereka, serta lebih terbuka terhadap pertanggungjawaban kepada masyarakat yang mereka layani.

Ketiga, dalam konteks efisiensi birokrasi, data kuantitatif seperti tingkat adopsi praktik akuntabilitas atau hasil audit keuangan dapat menjadi indikator utama. Transformasi yang berhasil harus menunjukkan peningkatan dalam efisiensi birokrasi, yang berarti bahwa pemerintah dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan kata lain, dampak transformasi administrasi publik dapat diukur dan dinilai secara kuantitatif dalam kualitas layanan, akuntabilitas pemerintah, dan efisiensi birokrasi.

Dalam konteks efisiensi birokrasi, data kuantitatif seperti tingkat adopsi praktik akuntabilitas atau hasil audit keuangan dapat menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan transformasi administrasi publik. Transformasi yang berhasil harus mencerminkan peningkatan efisiensi dalam birokrasi, yang berarti bahwa pemerintah mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih tepat. Pertama, tingkat adopsi praktik akuntabilitas seperti penerapan sistem pelaporan dan mekanisme pengawasan dapat mengukur sejauh mana pemerintah berkomitmen untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap aspek operasional mereka. Kedua, hasil audit keuangan yang lebih baik dapat mencerminkan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan penghindaran pemborosan. Dengan kata lain, transformasi administrasi publik yang berhasil dapat diukur dan dinilai secara kuantitatif dalam tiga aspek utama: kualitas layanan publik yang ditingkatkan, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah, dan efisiensi yang lebih baik dalam manajemen birokrasi. Semua ini merupakan indikator penting untuk mengukur dampak positif dari reformasi administrasi publik terhadap kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemerintah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami hubungan antara motivasi pegawai, kinerja mereka, dan tingkat akuntabilitas dalam administrasi publik modern. Pegawai yang memiliki tingkat motivasi yang tinggi dalam administrasi publik memiliki dampak positif yang signifikan pada kinerja institusi pemerintah secara keseluruhan (KOLONDAM, 2020). Motivasi yang tinggi dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Ketika pegawai merasa termotivasi, mereka cenderung memiliki dorongan ekstra untuk mencapai tujuan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Mereka lebih bersemangat, inovatif, dan cenderung bekerja dengan dedikasi yang lebih besar.

Hasilnya, tingkat efisiensi dan produktivitas dalam organisasi meningkat secara signifikan. Selain itu, hubungan antara kinerja pegawai dan tingkat akuntabilitas merupakan aspek kunci dalam mengukur efektivitas pemerintahan. Kinerja yang tinggi dan akuntabilitas yang kuat saling terkait erat. Pegawai yang memiliki kinerja yang baik cenderung lebih akuntabel terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka lebih mampu mengukur hasil kerja mereka secara objektif, mengidentifikasi kelemahan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Ketika akuntabilitas diterapkan secara efektif, pemerintah dapat dengan lebih baik memenuhi tugasnya kepada masyarakat, menghindari penyimpangan, dan meningkatkan transparansi (Sujarwoto, 2009).

Akuntabilitas pegawai yang memiliki kinerja yang baik adalah landasan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam administrasi publik (Basuki, 2018). Kinerja yang baik menciptakan dasar yang kuat untuk mengukur sejauh mana pegawai memenuhi target dan standar yang telah ditetapkan. Pegawai yang berkinerja tinggi tidak hanya mampu mengukur hasil kerjanya secara objektif, tetapi juga dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan tugas mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Lebih dari itu, akuntabilitas yang efektif mendorong pegawai untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat dengan memberikan layanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, akuntabilitas berperan dalam menghindari penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran etika. Pegawai yang akuntabel lebih cenderung beroperasi dalam batas-batas peraturan dan perundang-undangan, yang mengurangi risiko pelanggaran hukum.

Akuntabilitas juga menciptakan transparansi dalam tindakan pemerintah, memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana sumber daya publik digunakan dan bagaimana hasil kerja dicapai. Dengan demikian, kinerja yang baik dan akuntabilitas saling mendukung, menciptakan dasar yang kuat untuk efektivitas dan integritas dalam administrasi publik. Ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memenuhi tugasnya kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan legitimasi pemerintahan dalam mata publik.

Dalam konteks ini, hubungan antara motivasi, kinerja, dan akuntabilitas pegawai di dalam administrasi publik menjadi penting untuk dipelajari secara mendalam. Memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berdampak satu sama lain adalah langkah kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan (Hardi, 2020). Oleh karena

itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana motivasi pegawai mempengaruhi kinerja mereka, dan bagaimana kinerja ini mencerminkan tingkat akuntabilitas dalam konteks administrasi publik yang berubah dengan cepat.

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek-aspek ini secara terpisah. Namun, masih ada kebutuhan untuk menggabungkan pemahaman tentang bagaimana motivasi pegawai berhubungan dengan kinerja mereka, dan bagaimana kinerja pegawai menggambarkan tingkat akuntabilitas dalam administrasi publik yang semakin kompleks dan terkoneksi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan menganalisis dampak motivasi pegawai pada kinerja mereka dan bagaimana kinerja ini berdampak pada tingkat akuntabilitas di dalam organisasi administrasi publik.

Pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi pegawai dalam administrasi publik terletak pada peran mereka dalam menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Pegawai yang termotivasi cenderung bekerja dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja institusi pemerintah secara keseluruhan. Selain itu, hubungan antara kinerja pegawai dan tingkat akuntabilitasnya dapat menjadi indikator utama untuk mengukur efektivitas pemerintahan dalam memenuhi tugasnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara motivasi pegawai, kinerja, dan tingkat akuntabilitas dalam administrasi publik dalam era digital yang berubah dengan cepat.

#### **Data dan Analisis:**

- Contoh data mungkin termasuk hasil survei di mana pegawai memberikan skor untuk tingkat motivasi mereka, kemudian data kinerja mereka diukur dalam hal capaian target atau jumlah proyek yang diselesaikan dalam periode tertentu.
- Data akuntabilitas dapat diperoleh dari evaluasi atasan yang mencakup sejauh mana pegawai bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan melaporkan hasilnya.

#### **Submateri Penelitian:**

1. Pengukuran Motivasi Pegawai: Menjelaskan bagaimana motivasi pegawai diukur dalam penelitian ini, termasuk jenis pertanyaan yang digunakan dalam survei dan penggunaan skala likert.

2. Pengukuran Kinerja: Mendiskusikan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai, seperti penggunaan data historis atau evaluasi kinerja.
3. Pengukuran Akuntabilitas: Menjelaskan bagaimana akuntabilitas pegawai diukur, termasuk aspek-aspek apa yang dinilai untuk menilai tingkat akuntabilitas.
4. Analisis Data: Menjelaskan metode statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data, seperti analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel motivasi, kinerja, dan akuntabilitas.
5. Kesimpulan dan Implikasi: Menganalisis temuan penelitian dan menjelaskan implikasi mereka terhadap administrasi publik, termasuk cara mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digital.

Dengan mengumpulkan data kuantitatif dan melakukan analisis statistik yang tepat, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor motivasi memengaruhi kinerja pegawai dan bagaimana kinerja ini berhubungan dengan tingkat akuntabilitas dalam administrasi publik (Ahmad, 2015). Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam menghadapi perubahan era digital.

Dalam konteks latar belakang ini, penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data kuantitatif untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara variabel-variabel motivasi pegawai, kinerja, dan akuntabilitas dalam administrasi publik modern. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam transformasi administrasi publik di era digital.

## **Daftar Pustaka**

Afdila, A. &. (2022). Digitalisasi Administrasi Publik Sebagai Salah Satu Perwujudan Reformasi Birokrasi. . *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 27-32.

- Ahmad, J. (2015). Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi.
- Basuki, J. (2018). Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik. . *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* , 53-62.
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- KOLONDAM, O. K. (2020). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Mansyur, S. (2013). Efektivitas pelayanan publik dalam perspektif konsep administrasi publik. . *Academica* .
- Prakoso, C. T. (2020). Inovasi Layanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Perspektif Digital Government. *Jurnal Paradigma (JP)* , 131-146.
- Rahadian, A. H. (2019). Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. . *In Prosiding Seminar STIAMI* , (hal. 85-94).
- Sepriano, S. H. (2023). *TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK MENGHADAPI ERA DIGITAL*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setyasih, E. T. (2022). TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH DI ERA SOCIETY 5.0: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT. . *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* , 59-66.
- Sujarwoto, M. S. (2009). Kerangka Ilmu (Body of Knowledge) Administrasi Publik Dan Aplikasinya Dalam Riset. . *Pustaka. Ut. Ac. Id*, 1-54.
- Supriyadi, E. I. (2020). Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0. . *Jurnal RASI*, 12-22.
- Wijaya, H. (2013). *Metode penelitian pendidikan teologi*. . E-Modul, August.
- Zakariah, M. A. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

